

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Andi, Jakarta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2004, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Revrisond Baswir, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Sudarsono, dan Edilius, 2005, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

C. Jurnal

Putri. RR.A.M., 2020, "*Pelayanan Izin Lingkungan Dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS).*" *Jurist-Diction Law Journal*. 3(1), 287-302. DOI: 10.20473/jd.v3i1.17637.

Arrum, D.A. (2019). "*Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*" (*Online Single Submission*) *di Indonesia*. *Jurist-Diction Law Journal*. 2(5), 1631-1654. DOI: 10.20473/jd.v2i5.14222.